



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Pos-el : dishublh.anambas@gmail.com

Tarempa, 11 September 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/000.7.2.4/ 179 /DISHUBLH.SPNG/09/2025

No	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Kepulauan Anambas <i>(Soft Copy dan Hard Copy)</i>	1 Dokumen	Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :

Yang menerima

Nama :

NIP/NIPTT :

Tanda tangan :

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,



Abdul Kadir, ST., M.Si
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP.19790125-201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS



Rancangan Akhir **RENJA** | 2026



DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 — Pos-el : dishublh.anambas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Renja Perangkat Daerah (PD) dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada penetapan RKPD. Renja akan berfungsi sebagai pedoman PD dalam menyusun RKA PD. Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Diharapkan nantinya Renja ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan APBD Tahun 2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

Tarempa, 11 September 2025

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas,


Abdul Kadir, ST.M., Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19790125 201001 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024	6
II.2 Evaluasi Capaian Renja DISHUBLH Tahun 2024	6
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD	12
II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH	16
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	18
III.3 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	24
IV.1 Tabel VI.I Rumusan Rencana Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2026	30
BAB V PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja-PD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Renja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral Perangkat Daerah atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan perkiraan pencapaian kinerja Program/Kegiatan baik pada Renja PD dan Renstra-PD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Rancangan Renja-PD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

➤ Rancangan Tema Pembangunan :

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”.

➤ Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata;
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru;
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif;
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Rancangan Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan, Serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813).

1.3 Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun program dan kegiatan yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

❖ Tujuan

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2026;
3. Untuk memastikan dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun dokumen Rancangan RENJA Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bagian ini dituangkan dalam bentuk tabel yang berisi rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah (tahun n).

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

II. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2024.

II. 2 Evaluasi Capaian Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tidak berlangsung sesuai dengan rencana awal dikarenakan adanya perkembangan isu strategis daerah, global dan nasional, sehingga mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Melalui Rancangan Renja Tahun 2026 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan Penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 10 Program, 21 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.591.983.406,86. Dari pagu sebesar Rp. 21.591.983.406,86 telah terealisasi sebesar Rp. 16.318.509.720,00 (58,20%) dan realisasi fisik 72,19%.

Program/kegiatan yang tertuang dalam Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024 serta perubahannya adalah sebagai berikut:

**Tabel. II.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PAGU ANGGARAN PERUBAHANNYA
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD	Pagu Perubahan
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.595.891.133,00	5.812.761.247,00
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	359.592.000,00	341.424.000,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.420.985,00	7.111.923,80
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.162.695,00	130.801.072,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.463.956,00	122.986.011,06
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.567.250,00	90.773.000,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.750.000,00	69.000.000,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.232.000,00	368.805.520,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.527.920,00	41.527.920,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.686.000,00	69.783.300,00
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.267.000,00	13.267.000,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.745.480.864,00	6.191.260.750,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.267.530,00	556.857.530,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.509.800,00	84.509.800,00
	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.230.174,00	5.230.174,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	13.170.399,00	31.970.816,00
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.083.300,00	1.083.300,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	396.881.958,00	291.158.542,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.174.000,00	5.662.000,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.700.000,00	45.730.000,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.970.000,00	90.975.000,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.036.237,00	20.036.237,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.360.288,00	5.670.500,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.960.000,00	32.360.000,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.140.000,00	7.140.000,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.080.000,00	205.080.000,00
	UPT PENGELOLAAN SAMPAH		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	846.000,00	846.000,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.406.280,00	4.406.280,00

2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000 ,00	1.000.000 ,00
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.700.280,00	9.700.280,00
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.177.000,00	5.177.000,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.400.000,00	27.400.000,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.720.000,00	2.720.000,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.077.273,00	3.077.273,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	417.623.067,00	417.623.067,00
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.510.900,00	2.680.000,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.420.000,00	5.420.000,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	386.637.097,00	340.228.932,00
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.675.000,00	3.675.000,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	27.160.000,00	27.160.000,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten/Kota	18.510.000,00	18.510.000,00
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.162.000,00	5.162.000,00
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8.250.000,00	8.250.000,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dn/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	27.621.465,00	27.621.465,00

2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dn/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1,277.050.273,00	1,277.050.273,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.185.145.574,00	3.577.692.728,00
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	437.281.408,00	474.731.641,00
2.15.03.2.12.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Lokal	25.616.603,00	25.616.603,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	26.150.000,00	26.150.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	58.690.753,00	58.690.753,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	143.005.440,00	143.054.940,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	56.257.360,00	56.257.360,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		
2.11.11.2.01.013	Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	99.870.360,00	119.871.360,00
2.11.11.2.01.015	Penanganan Sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	223.491.466,00	223.491.466,00
Total		21.188.391.070,00	21.591.983.406,86

II. 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah :
 1. Isu keselamatan transportasi terkait kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas serta ketersediaan sarana prasarana transportasi;
 2. Isu kegiatan Pembangunan pelabuhan – pelabuhan Penyeberangan yakni Matak – Mubur, Jemaja – Jemaja Barat dan Pelabuhan Penyeberangan Multipurpose Teluk Red.
 3. Isu Pendukung disektor Pariwisata yakni Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kapal Wisata (Yacht)
 4. Isu dokumen Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Genting – Penebung (Siantan – Bajau)
 5. Inovasi-inovasi dibidang lingkungan hidup dengan peningkatan pelayanan persampahan yang efektif dan efisien maka diperlukanya Pengadaan Alat Incinerator di tiga pulau besar serta perekrutan Tenaga Persampahan melalui Outsourcing serta Rehabilitasi gedung persampahan.
 6. Penyusunan Dokumen perencanaan Pengelolaan Persampahan menjadi prioritas penting yang selama ini belum terlaksana kegiatan tersebut.
 7. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Anambas;
 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 9. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan perencanaan dibidang lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat/ fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.

- Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi;
 2. Mengikuti Pendidikan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
 3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
 4. Peningkatan pelayanan dibidang Perhubungan dan lingkungan hidup terhadap seluruh lapisan masyarakat.

➤ Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
3. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

➤ Isu Isu Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan pembangunan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan pemanfaatnya. Ketidakeimbangan serta peminggiran terhadap peran serta dari salah satu elemen tersebut bisa berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, semua program pembangunan harus memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, kegiatan yang sejalan dengan PUG antara lain pembangunan Pelabuhan. Desain pelabuhan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam bentuk desain yang humanis sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat baik laki-laki, wanita, anak-anak dan pengguna berkebutuhan khusus (Disabilitas).

➤ Strategi Kabupaten Kota Sehat

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Kegiatan yang menunjang Program Kabupaten Kota Sehat adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan bersih permukiman
- b. Pengelolaan Sampah
- c. Tempat Pemrosesan akhir sampah di TPAS
- d. Pengembangan kinerja pengolahan sampah

II. 4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari PD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Tabel.II.2 Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Kecamatan	Usulan Musrenbang	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5
1	Siantan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan ARMADA Pengangkutan Sampah • Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Teluk Mabai 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Tarempa Barat • Desa Pesisir Timur 	
2	Kute siantan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dermaga - Pemecah Ombak 	Desa Matak Desa teluk Bayur	
3	Siantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lampu penerangan jalan umum dan sarana umum kecamatan • Pengadaan Transportasi Laut • Pemeliharaan Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Air Bini • Mengkait • Desa Lingai 	
4	Siantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Pelabuhan • Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS • Perlunya peningkatan operasional pelayaran dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal • Perlunya peningkatan operasional pelayaran dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Lidi • Desa Air Nangak • Desa Air sena • Desa Lidi 	
5	Siantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Pelabuhan Dusun Mubur kecil • Pembangunan Pelabuhan Jl. Sungai Sidi RT.004 RW.002 • Pembangunan Pelabuhan Jl. Air Balok RT.001 RW.001 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Piasan • Desa Mubur • Desa Mubur 	
6	Siantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan Trestel Dermaga Pelabuhan Baruk RT.006 RW.002 Dusun II 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Temburun 	
7	Jemaja	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pelabuhan - Pembangunan Ruang tunggu Penumpang - Lahan Terbuka Hijau - Pelabuhan Apung - Pengadaan Lampu Jalan - Pembangunan Pelabuhan Sedanau rt.003 rw. 001 - Pembangunan Tambatan Perahu 	Desa Kusik Desa Mampok Desa Air Biru Desa Air Biru Desa rewak Desa Rewak	

		Dapan RT.004 RW.003		
8	Jemaja Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pelabuhan Desa Genting Pulur 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Genting Pulur 	
9	Jemaja Barat	Penyambungan pelabuhan Pelantar beton	Desa Impol	
10	Palமாக	<ul style="list-style-type: none"> • Tambatan Perahu • pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal • Pengadaan Lampu Penerangan Jalan dan Sejenisnya • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST • Perlunya peningkatan operasional pelayaran dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal • Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan • Penambahan Panjang Pelabuhan • Peningkatan Pelabuhan Bongkar Muat RT.007 RW.004 • Pelabuhan Tambatan perahu RT.005 RW.003 • Pelabuhan Tambatan perahu RT.008 RW.004 • Pelabuhan Tambata Perahu RW.002 • Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Teluk Durian 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Teluk Durian • Desa matak • Desa Teluk Bayur • Desa Payalaman • Desa Candi • Desa Belibak • Desa Tebang • Desa Piabung • Desa Piabung • Desa Piabung • Desa Piabung • Desa Teluk Bayur 	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa tema dan Isu program Prioritas Pembangunan Nasional antara lain yaitu

1. Penguatan sumberdaya manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian inflasi di daerah;
5. Peningkatan Pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan;
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
8. Serta dengan tetap mengarahkan pada pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Kota Sehat (KKS), Pengarusutamaan gender (PUG) Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGS), konektivitas wilayah, Penerapan Blue Economy, Inovasi daerah dan pemenuhan SPM.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) periode 2025-2029, beberapa isu strategis telah diidentifikasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sektor transportasi di Indonesia. Berikut adalah isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam Renstra tersebut:

1 Bidang Transportasi Darat

- a) Kinerja Logistik Nasional: Meningkatkan efisiensi sistem logistik untuk menurunkan biaya dan waktu pengiriman barang.
- b) Kemacetan di Kota Besar dan Metropolitan: Mengatasi masalah kemacetan lalu lintas melalui perencanaan dan manajemen transportasi yang efektif.
- c) Konsumsi Energi dan Emisi: Mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat.
- d) Ketimpangan Wilayah 3TP: Meningkatkan aksesibilitas transportasi di wilayah Terpencil, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan.
- e) Peningkatan Keselamatan Transportasi: Meningkatkan standar keselamatan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

2 Bidang Transportasi Laut

- a) Konektivitas Transportasi Laut Nasional: Meningkatkan jaringan transportasi laut untuk memastikan keterhubungan antar pulau.
- b) Kinerja Pelayanan Transportasi Laut: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan transportasi laut.
- c) Keselamatan Transportasi Laut: Meningkatkan standar keselamatan dalam operasional transportasi laut.
- d) Dampak Lingkungan Sektor Transportasi Laut: Mengurangi dampak negatif transportasi laut terhadap lingkungan.

e) Tata Kelola di Bidang Perhubungan Laut: Memperbaiki sistem manajemen dan regulasi di sektor transportasi laut.

3 Bidang Transportasi Udara

- a) Pengembangan Konsep Hub dan Spoke: Meningkatkan konektivitas penerbangan dengan mengembangkan bandara sebagai pusat penghubung (hub) dan rute pengumpan (spoke).
- b) Evaluasi Harga Tiket Pesawat Udara: Meninjau kembali struktur tarif untuk memastikan keterjangkauan bagi masyarakat.
- c) Pengembangan Seaplane/Waterbase: Memanfaatkan potensi perairan Indonesia untuk transportasi udara dengan pesawat amfibi.
- d) Peningkatan Infrastruktur Logistik di Wilayah Timur: Memperbaiki layanan kargo udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.
- e) Peningkatan Kapasitas dan Konektivitas: Memperluas kapasitas bandara dan rute penerbangan untuk mendukung pertumbuhan jumlah penumpang dan ekonomi nasional.
- f) Program Jembatan Udara dan Pelayanan Keperintisan: Menyediakan layanan penerbangan ke daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan (3TP) untuk meningkatkan aksesibilitas.
- g) Skema Pembiayaan Non-APBN: Menggali alternatif pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek transportasi udara.
- h) Adaptasi Teknologi Baru: Mengintegrasikan teknologi seperti drone, smart airport, dan keamanan siber dalam operasional penerbangan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup periode 2025-2029, Berikut adalah isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam Renstra tersebut :

1. Tingginya Risiko Bencana: Indonesia menghadapi berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Penanganan risiko ini menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.
2. Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA): Pengelolaan SDA yang berkelanjutan penting untuk mencegah degradasi lingkungan dan memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang.
3. Kualitas Lingkungan Hidup yang Masih Rendah: Isu pencemaran air, udara, dan tanah memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Ketimpangan Sosial Ekonomi: Perbedaan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar antara kelompok masyarakat perlu diatasi untuk mencapai keadilan sosial.
5. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Menuju Kota Keberlanjutan: Inovasi teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
6. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik: Penguatan tata kelola diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan lingkungan yang efektif dan efisien.

Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RKPD 2026 sebagai berikut : **"Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif"**.

Sedangkan yang menjadi Rancangan Prioritas Pembangunan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesenjangan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata;
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru;
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif;
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

III. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 adalah **"Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera"**. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Untuk mewujudkan visi maka dibuat misi, adapun misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan 5 (lima) yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yakni :

1. Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.
2. Meningkatkan Daya saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan.
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Misi pembangunan yang selaras dengan urusan Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatkan Daya saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan dan;
2. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2026, yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi;
 - a. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan jalan;
 - b. Meningkatnya system pelayanan angkutan umum.
2. Mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Terciptanya lingkungan daerah perkotaan dan pesisir yang bersih.

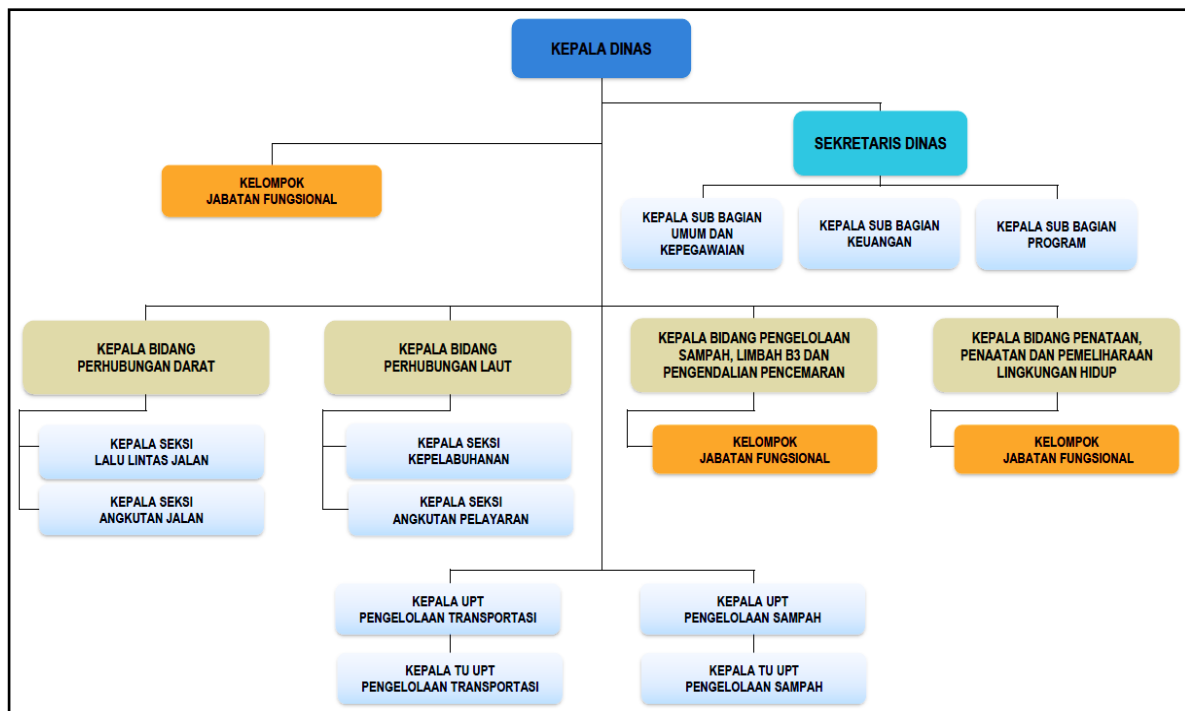
Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 sesuai dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Tujuan dan Sarasan Renstra DishubLH 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan	73,02	73,29	73,55	73,81	74,08	74,84
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	56,60	56,70	56,80	56,90	57,00	57,10
			Indeks Kualitas Udara	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85
			Indeks Kualitas Lahan	78,43	79,27	80,11	80,96	81,81	82,66
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja		Nilai Reformasi Birokrasi	30,00	40,00	50,00	60,10	60,20	60,20
		Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	Nilai AKIP	55,00	57,00	60,00	60,10	60,20	60,20
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,45	0,61	0,74	0,84	1,00	1,00
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,00
		Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	43,20	59,50	73,00	83,80	100	100
			Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapras alat perlengkapan jalan	51,61	59,45	66,82	74,65	82,49	89,86

III.3 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi Kepala Seksi/Kasubbag (*terlihat pada gambar dibawah ini*) :



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, DISHUBLH mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISHUBLH;
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISHUBLH;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Perhubungan Darat
3. Bidang Perhubungan Laut
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
5. Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan teknis urusan perhubungan dan lingkungan hidup,

DISHUBLH memiliki 2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu :

1. UPT Pengelolaan Transportasi
2. UPT Pengelolaan Sampah

DATA APARATUR DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 84 orang. Dari ke 84 pegawai tersebut, 35 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 49 orang berstatus PPPK.

Tabel. III.2 Data Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan							Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	NON	
1	PNS	5	20	5	5	-	-	-	35
2	PPPK	-	11	6	23	1	8	-	49
	Jumlah	5	31	11	28	1	8		84

Tabel III.3
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina TK.I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	2
3	Penata Tk.I (III/d)	8
4	Penata (III/c)	5
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	6
6	Penata Muda (III/a)	10
7	Pengatur Tk.I (II/d)	3
Jumlah		35

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan antara lain :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kapasitas SDM di bidang perhubungan guna mengembangkan layanan dan implementasi program, pengawasan dan pengendalian di lapangan;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana memerlukan kajian dan penelitian yang komprehensif terhadap prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan;
3. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas;
4. Belum optimal penanganan akhir sampah karena lahan TPA belum tersedia;
5. Petugas sampah banyak yang sudah berusia lanjut;
6. Belum adanya tempat pembibitan pohon karena tidak ada lahan milik Pemda;
7. Belum terintegrasinya pembinaan pendidikan lingkungan hidup;
8. Belum tersedianya Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Pelabuhan yang sudah terbangun minim dengan sarana prasarana penunjang seperti ruang tunggu, lampu penerangan, dll.
2. Minimnya rambu-rambu yang ada di wilayah perairan yang digunakan sebagai jalur pelayaran.
3. Selain konektivitas, terdapat masalah lain di bidang perparkiran. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, banyak kendaraan yang menggunakan jalan sebagai lokasi parkir inap. Selain itu, penerimaan daerah dari sektor perparkiran juga belum optimal.
4. Penanganan sampah yang belum optimal, karena terbatasnya sarana prasarana.

5. Tingginya produksi sampah rumah tangga yang belum diimbangi kemampuan pengelolaan sampah.
6. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, antara lain dengan membuang sampah dilaut/sungai.
7. Maraknya aktivitas penambangan liar/ tanpa izin yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2026 beserta indikatornya dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan tersebut. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Agar tujuan Dinas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tercapai diperlukan adanya tindakan nyata berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada RENSTRA /RPJMD.

Pada tahun 2026 program/kegiatan yang diusulkan meliputi 13 Program, 25 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

❖ **PROGRAM**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
5. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
6. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAG B3)
7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

9. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
12. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
13. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

❖ **KEGIATAN**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
14. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
15. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
16. Penyimpanan Sementara Limbah B3
17. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

18. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
21. Pengelolaan Sampah
22. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
23. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
24. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
25. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

❖ **SUB KEGIATAN**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
5. Penyediaan Bahan/Material (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
12. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
13. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
14. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
15. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

16. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
17. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
18. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
19. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
20. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
21. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
22. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
23. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
24. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
25. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
26. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
27. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
29. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
30. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
31. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
32. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
33. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
34. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
35. Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
36. Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
37. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
38. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)

39. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
40. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
41. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
42. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
43. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
44. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
45. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
46. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
47. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
48. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
49. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
50. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
51. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
52. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
53. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
54. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
55. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
56. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
57. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
58. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
59. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
60. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
61. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 beserta pagu anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel VI.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
01.00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								35,627,591,721
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	14,675,487,694			100 %	14,760,708,359
		Indeks Kepuasan Masyarakat		87 %			88 %		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80 %	20,000,000			80 %	22,220,000
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	5 Dokumen	10,000,000	APBD		5 Dokumen	10,100,000
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	3 Laporan	5,000,000	APBD		3 Laporan	10,100,000
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggara Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	1,010,000
2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengeumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	1 Data	2,500,000	APBD		1 Data	1,010,000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95 %	14,143,870,840.00			95 %	14,275,209,548
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas	214 Orang/ Bulan	14,043,870,840	APBD		217 Orang/ Bulan	14,164,109,548
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	111,100,000
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi BMD Perangkat Daerah		80 %	10,000			80 %	13,130,000
2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	10,000	APBD		1 Laporan	13,130,000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	256,606,854.00			80 %	241,532,584
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	5,000,000	APBD		2 Paket	5,475,195
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	30,000,000	APBD		2 Paket	30,300,000

2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	40,000,000	APBD		2 Paket	35,350,000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	30,000,000	APBD		2 Paket	31,279,889
2.15.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	25,000,000	APBD		2 Laporan	32,067,500
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	126,606,854	APBD		2 Laporan	107,060,000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	105,000,000			80 %	134,815,729
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	25,000,000	APBD		2 Laporan	31,843,199
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	50,000,000	APBD		2 Laporan	69,372,860
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	10,000,000	APBD		2 Laporan	13,399,670
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	20,200,000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	150,000,000			80 %	73,800,498
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas	8 Unit	100,000,000	APBD		8 Unit	49,045,600
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	24,754,898
01.1	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	400,010,000			100 %	344,120,905
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	272,295,040			80 %	210,396,614
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	1,500,000	APBD		2 Paket	2,525,000
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	10,000,000	APBD		2 Paket	5,050,000
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	1,083,300	APBD		2 Paket	1,800,830

2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Paket	227,537,740	APBD		3 Paket	121,907,000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Paket	2,174,000	APBD		3 Paket	57,934,084
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	30,000,000	APBD		2 Laporan	21,179,700
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80 %	10,000			80 %	25,250,000
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	10,000	APBD		1 Unit	25,250,000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	48,876,288	APBD		80 %	57,529,891
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	3 Laporan	9,360,288	APBD		3 Paket	9,453,891
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Laporan	39,516,000	APBD		3 Laporan	48,076,000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	78,828,672			80 %	50,944,400
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit	7,140,000	APBD		2 Unit	9,877,800
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas	3 Unit	71,688,672	APBD		3 Unit	41,066,600
01.2	UPT PENGELOLAAN SAMPAH								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	400,000,000			100 %	363,800,816
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	51,557,000			80 %	103,201,800
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	1,000,000	APBD		2 Paket	1,515,000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Paket	4,400,000	APBD		3 Paket	15,150,000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	8,057,000	APBD		2 Paket	23,815,800

2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	1,000,000	APBD		2 Paket	15,150,000
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	9,700,000	APBD		2 Paket	9,797,000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	27,400,000	APBD		2 Laporan	37,774,000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	5,720,000			80 %	7,963,709
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	2,720,000	APBD		1 Laporan	4,471,634
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	3,000,000	APBD		2 Laporan	3,492,075
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	342,723,000			80 %	252,635,307
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Anambas	6 Unit	340,212,100	APBD		6 Unit	250,099,298
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	2,510,900	APBD		1 Unit	2,536,009
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.Konektivitas Darat		0.32 %	1,220,060,000			0.37 %	1,414,530,568
		2.Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		22 %				24 %	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		80 %	1,120,020,000			80 %	910,032,756
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Kepulauan Anambas	5 Unit	10,000	APBD		5 Unit	126,962,000
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	5 Unit	720,000,000	APBD		5 Unit	412,137,414
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	5 Unit	10,000	APBD		5 Unit	139,876,000
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	5 Unit	400,000,000	APBD		5 Unit	231,057,342
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		80 %	100,020,000			80 %	134,114,200

2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	100,000,000	APBD	1 Laporan	42,361,000
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit	10,000	APBD	2 Unit	60,678,200
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	10,000	APBD	1 Laporan	31,075,000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		80 %	20,000		80 %	370,383,612
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	10,000	APBD	1 Laporan	30,383,612
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	10,000	APBD	1 Unit	340,000,000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut		0.35 %	9,487,442,642.59		0.37 %	17,921,878,434
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		80 %	9,487,442,643		80 %	17,921,878,434
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kab. Kepulauan Anambas	3 Unit	6,407,164,994.59	APBD	3 Unit	17,421,878,434
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	2,680,277,648	APBD	2 Unit	250,000,000
2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	400,000,000	APBD	2 Unit	250,000,000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air		60.1 %	40,000,000		60.2 %	22,000,000
		Indeks Kualitas Udara		94.55 %			94.65 %	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		80 %	40,000,000		80 %	22,000,000

2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab. Kepulauan Anambas	2 Lokasi	40,000,000	APBD		2 lokasi	22,000,000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH		48 %	100,000,000			49 %	88,385,000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Perlindungan Lingkungan Hidup		80 %	100,000,000			80 %	88,385,000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	0.9 Ha	100,000,000	APBD		1 Ha	88,385,000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola		54 %	10,000			55 %	27,500,000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Diawasi		80 %	10,000			80 %	27,500,000
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	10,000			2 Laporan	27,500,000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		96.5 %	279,056,391.11			96.7 %	157,360,434
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		80 %	279,056,391.11			80 %	157,360,434
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Kepulauan Anambas	3 Badan Usaha	279,056,391.11	APBD		3 Badan Usaha	157,360,434

2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya		85 %	225,000,000			90 %	100,383,096
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80 %	225,000,000			80 %	100,383,096
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Dokumen	200,000,000	APBD		3 Dokumen	61,883,096
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab. Kepulauan Anambas	20 Orang	25,000,000			20 Orang	38,500,000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		92 Persen	10,000			95 %	27,500,000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80 %	10,000			80 %	27,500,000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Kepulauan Anambas	5 Entitas	10,000	APBD		5 Entitas	27,500,000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		100 Persen	10,000			100 %	27,500,000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diverifikasi		80 %	10,000			80 %	27,500,000
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Kepulauan Anambas	2 Pengaduan	10,000	APBD		2 Pengaduan	27,500,000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks kinerja pengelolaan sampah		54 %	2,360,000,000			55 %	371,924,109
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		17.53 %				20.28 %	
		Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		58.83 %				61.57 %	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sampah		80 %	2,360,000,000			80 %	371,924,109
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kab. Kepulauan Anambas	13 Ton	70,000,000	APBD		14 Ton	125,588,496
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kab. Kepulauan Anambas	8 Unit	2,290,000,000	APBD		8 Unit	246,335,613

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan urusan bidang Perhubungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat bidang Perhubungan dan lingkungan hidup.

Output Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah program tahunan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 11 September 2025

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas,



ABDUL KADIR, ST., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19790125 201001 1 007